

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat baik aspek perekonomian, sumber daya manusia, sumber daya alam, pendidikan maupun industri untuk menuju situasi yang lebih baik, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Upaya peningkatan kesejahteraan ini pada umumnya dilakukan melalui proses pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu sasaran pembangunan adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana tidak mampu secara ekonomi untuk mencukupi standar dalam mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, serta standar kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi yang dapat menghambat terciptanya kehidupan yang sejahtera bagi masyarakatnya, sehingga masalah kemiskinan yang terjadi akan menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Syukri dan Hinaya (2019), masalah kemiskinan dianggap bersifat multidimensi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius, menyeluruh serta terpadu dari berbagai aspek dalam mengatasi kemiskinan.

Kemiskinan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menjadi tanggung jawab bersama. Kemiskinan bagi pemerintah daerah menjadi tanggung jawab utama untuk menyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat disebuah pemerintahan, untuk segera mencari solusi guna menanggulangi angka kemiskinan yang lumayan tinggi.

Permasalahan kemiskinan dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Purnomo (2016) faktor-faktor yang menjadikan penentu kemiskinan yaitu, pertama, modal sumber daya manusia (*human capital*) yang di indikasikan dengan tingkat pendidikan, karena yang akan mempengaruhi kemampuan untuk memperoleh pekerjaan atau pendapatan yaitu faktor modal SDM. Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi kemungkinan seseorang bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi. Kedua, modal fisik produktif yang meliputi luas lantai perkapita dan kepemilikan asset seperti lahan. Khususnya untuk sektor pertanian, kepemilikan lahan akan menjadi faktor penting mengingat dengan ketersediaan lahan yang produktif, seseorang dengan lapangan usaha pertanian akan bisa menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Ketiga, status pekerjaan, status pekerjaan dapat memberikan dampak bagi pola pendapatan seseorang.

Selain modal dan sumber-sumber daya alam, pemerintah juga harus mengembangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya dalam pembangunan. Pembangunan manusia memiliki tujuan untuk kemajuan suatu negara, dimana kualitas SDM yang baik akan membantu negara memaksimalkan segala sumber daya yang ada agar mencapai kemakmuran yang berkelanjutan. Tidak adanya pembangunan manusia membuat suatu negara tidak akan dapat mengembangkan apapun (Chalidn & Yusuf, 2014). Pembangunan manusia harus dilakukan guna mencetak sumberdaya manusia yang memadai untuk melaksanakan pembangunan.

Banyak hal lain yang harus diperjuangkan dalam meningkatkan pembangunan. Seperti pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual, pertanian dan pelestarian ragam kehidupan budaya masyarakat (Surachman *et al.*, 2018).

Pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor bila dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai. Pemerintah sebaiknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika melihat manusia adalah subjek dan objek pembangunan, maka pembangunan manusia dapat menudorong pembangunan di berbagai sektor. Hal ini akan menciptakan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan tersebut.

Kemiskinan yaitu permasalahan yang kompleks. Hal tersebut perlu diatasi secara menyeluruh. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) merencanakan tingkat kesejahteraan yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menggunakan potensi ekonomi di Indonesia secara efisien, diharapkan dapat menghasilkan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan, serta kemajuan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan merupakan beberapa fokus utama dalam RPJMN (Bappenas, 2005).

Salah satu upaya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian adalah dengan pemodalan sektor pertanian ialah Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sektor pertanian fungsinya dalam pendanaan pelaksanaan program-program yang telah disusun suatu dinas untuk pembangunan sektor pertanian. Program pertanian yang dirancang supaya bisa meringankan para petani dalam mengembangkan sektor pertanian di daerahnya. Program disusun dan diselaraskan dengan keperluan akan suatu wilayahnya daerah pedesaan dan perkotaan (Umiyati, 2014). Pengeluaran pemerintah memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan. Sebagai penggerak utama perekonomian Pengeluaran pemerintah dapat memainkan perannya, sehingga ketika perekonomian mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi, pemerintah melalui instrument kebijakan dapat menolong situasi. Salah satu langkah yang bisa dilakukan dengan meningkatkan Pengeluaran pemerintah melalui anggaran belanjanya.

Dalam sektor kesehatan pemerintah dapat memberikan asuransi kesehatan, peranan pemerintah inilah yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan (Suwandika & Yasa, 2015). Besarnya Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan dan sektor kesehatan dan pertanian akan mempengaruhi pembangunan manusia yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia. Meningkatnya indeks pembangunan manusia akan mengurangi tingkat kemiskinan secara alami yang akan berlanjut pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Arsyianti & Beik, 2017).

Pendidikan merupakan elemen terpenting dalam memberantas kemiskinan. Seseorang yang memperoleh pendidikan akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dan bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Pengaruh pendidikan tidak Cuma mempengaruhi untuk mendapat tingkat upah, tetapi juga terhadap perilaku dan pengambilan keputusan, yang akan meningkatkan kemungkinan sukses dalam menjangkau kebutuhan pokok, bahkan pendidikan akan membuat seseorang terhindar dari kondisi miskin (Ariza, 2016). Rendahnya tingkat pendapatan juga berdampak pada rendahnya kemampuan seseorang mengakses pelayanan kesehatan.

Topik kemiskinan tetap menjadi topik penting bagi negara-negara berkembang, begitu juga dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya.

Dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan yaitu dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender dan seterusnya.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2014-2018 rata-rata 6,9 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan persentase

kemiskinan nasional dengan rata-rata sebesar 9,66 persen. Rata-rata tingkat kemiskinan kepulauan mentawai menempati posisi yang paling tinggi yaitu sebesar 17,41 persen. Di urutan kedua ditempati oleh Kabupaten Solok dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 9,36 persen. Di urutan ketiga ditempati oleh Padang Pariaman dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 8,53 persen. Di urutan keempat ditempati oleh Pesisir Selatan dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 7,92 persen. Dan di posisi terakhir ditempati oleh Kota Sawahlunto dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 2,22 persen (Tabel dinamis BPS Sumatera Barat, 2019).

Pengeluaran pemerintah provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 –2018 dalam sektor kesehatan terus mengalami kenaikan dan sementara pada sektor pendidikan dan pertanian mengalami penurunan. ini mencerminkan berbagai upaya pemerintah Sumatera Barat dalam meningkatkan pembangunan manusia meskipun tidak selalu menaikkan anggaran yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia (BPS Sumatera Barat, 2018).

Menurut Ariza (2016) Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan suatu kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Dari pembahasan di atas terungkap bahwa pemerintah berusaha dengan bijak dalam menentukan alokasi anggaran di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian, menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang mendapat akses atas pendidikan kesehatan dan pertanian. Seperti yang disebutkan oleh Suwandika dan Yasa (2015) bahwa masalah kemiskinan tidak hanya masalah income semata melainkan terkait

dengan kapabilitas-kapabilitas yang harus dimiliki oleh seseorang dalam hal ini salah satunya menyangkut masalah akses-akses, baik terhadap pendidikan, kesehatan dan pertanian. Dengan demikian penanganan kemiskinan akan lebih menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, lebih di fokuskan pada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan dengan PDRB atau pertumbuhan ekonomi, karenabelanja untuk pembangunan ditujukan untuk membiayai agenda pembangunan dan dari Pengeluaran ini akan dihasilkan produk-produk yang sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menjadikan naiknya PDRB karena adanya kenaikan output agregat. Maka penulis tertarik untuk menganalisis Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2015-2018.

1.2.Rumusan Masalah

Salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam mengatasi tingkat kemiskinan adalah lewat Pengeluaran pemerintah, yang merupakan cerminan bukti nyata peran pemerintah dalam mengatasi tingkat kemiskinan. rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengeluaran pemerintah disektor pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2015-2018?
2. Apakah pengeluaran pemerintah disektor kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2015-2018?
3. Apakah pengeluaran pemerintah disektor pertanian berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2015-2018?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di sumatera barat, yang dilihat dari indeks pendidikan di Sumatera Barat tahun 2015-2018.
2. Mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah disektor kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di sumatera barat, yang dilihat dari indeks harapan hidup di SumateraBarat tahun 2015-2018.
3. Mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pertanian terhadap tingkat kemiskinan di sumatera barat, yang dilihat dari indeks pertanian di Sumatera Barat tahun 2015-2018.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu

1. Sebagai bahan masukan bagi penelitian–penelitian sejenis mengenai analisis Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun. 2015-2018.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan anggaran Pengeluaran di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian guna menekan angka kemiskinan secara maksimal.

3. Sebagai informasi tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas terutama bagi mahasiswa jurusan ilmu Ekonomi tentang menganalisis Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian terhadap tingkat kemiskinan.

